Sengketa Pulau Sipadan dan lingitan









Kelompok

- 1. Intan ayu nuraen
- 2.Mega aulia
- 3.marsha aulia ramania
- 4.Neneng anjarwati
- 5.Aditia irwansyah
- 6.Fazrin setiawan
- 7.m tegar prawira u





latar belakang

Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di timur laut Pulau Kalimantan, sekitar 150 kilometer dari Pulau Tarakan di Kalimantan Utara.

Kronologi sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan berlangsung selama 33 tahun, yakni dari 1969 hingga 2002.

Akar sejarah sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia di daerah Pulau Sipadan dan Ligitan bermula dari ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris



Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah perselisihan antara Indonesia dan Malaysia mengenai kedua pulau tersebut yang terletak di perairan timur Kalimantan.

Perselisihan ini dimulai pada tahun 1969 ketika kedua pulau tersebut ditemukan oleh pihak Malaysia, tetapi Indonesia mengklaim bahwa kedua pulau itu merupakan bagian dari wilayahnya berdasarkan sejarah dan batas laut yang diakui secara internasional.



Kasus ini berlanjut ke Mahkamah Internasional pada tahun 1999 setelah upaya penyelesaian damai gagal. Pada tahun 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia berdasarkan prinsip pemberian hak kedaulatan yang berlaku pada saat itu. Keputusan ini ditentang oleh pemerintah Indonesia, tetapi akhirnya Indonesia menerima keputusan tersebut pada tahun 2003.



Meskipun sengketa tersebut telah diatasi secara hukum, isu-isu terkait kedaulatan dan kedudukan geografis kedua pulau masih menjadi perdebatan di antara kedua negara.

Upaya kerjasama bilateral telah dilakukan untuk mengelola sumber daya alam dan kepentingan lain di wilayah tersebut.



Siapa yang melepaskan Pulau Sipadan dan Ligitan?

Dalam sejarah Indonesia, Pulau Sipadan dan Ligitan lepas pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri

Bagaimana cara menyelesaikan sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia?

Penyelesaian sengketa yang dianggap tepat dalta batas laut antara Indonesia dan Malaysia adalah negosiasi dan jika melalui negosiasi tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah dengan membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Hukum Laut Internasional.

